

Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kelurahan Tamamung Kecamatan Panakukkang Kota Makassar

Government Efforts In Handling Covid-19 In Tamamaung Village, Panakukkang Sub-District, Makassar City

Sesilia Claudya G. Kelen^{*}, Syamsuddin Maldun, Nurkaidah

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: novakelen15@gmail.com

Diterima: 10 Maret 2022 / Disetujui : 30 Juli 2022

Abstrak

Virus Corona atau Corona Virus Disease (Covid-19) Ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) sebagai wabah pandemik global yang menyebabkan seluruh masyarakat menjadi takut dan resah. Laju penyebaran virus ini terbilang sangat cepat serta masif sehingga membuat pemerintah, baik dari pemerintah pusat hingga pada tingkat terendah seperti kelurahan harus benar-benar sigap melakukan berbagai upaya dalam pencegahan serta penanggulangan terhadap virus tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan kebijakan terkait penanganan wabah covid-19. Peneliti merasa penting untuk mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 di tingkat kelurahan serta terkait dengan respon dari masyarakat dalam menanggapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik. Dalam penelitian kualitatif analisis data menggunakan cara induktif yakni dari umum ke khusus. Data dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan juga dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemerintah kelurahan tetap menjalankan kebijakan berdasarkan prosedur yang ada. Masih kurangnya sosialisasi yang belum berjalan dengan maksimal diperlihatkan dengan beberapa masyarakat yang masih belum memahami beberapa kebijakan yang ada. Terjadi perubahan sikap pada masyarakat terkait respon dalam bentuk kognitif, afektif, dan konatif atau tindakan sejak hadirnya wabah covid-19

Kata Kunci: Covid-19, Upaya, Pelaksanaan Kebijakan, Respon Masyarakat

Abstract

Corona Virus or Corona Virus Disease (Covid-19) is Defined by the World Health Organization (WHO) as a global pandemic that causes the whole community to be afraid and anxious. The rate of spread of this virus is quite fast and massive, so the government, both from the central government to the lowest level such as the sub-district, must be alert to make various efforts in the prevention and control of the virus. Efforts made by the government are to issue policies related to handling covid-19 outbreaks. Researchers feel it is essential to examine the efforts made by the government in tackling covid-19 at the sub-district level and related to the response from the community in response to policies issued by the government. This study uses a qualitative approach using deductive methods that examine the phenomenon, in general, to find results. In qualitative research, data analysis uses inductive methods, from available to specific. Data in this study were obtained from interviews and documentation. The conclusion of this study is that the village government still runs the policy based on existing procedures. There is still a lack of socialization that has not worked to the maximum, as is shown by some people who still do not understand some of the existing policies. There have been changes in attitudes in society related to responses in the form of cognitive, affective, and conative actions since the presence of the covid-19 outbreak

Keywords: Covid-19, Efforts, Policy Implementation, Community Response



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan sebuah wabah yang dikenal dengan *Corona Virus Disease* atau virus corona (Covid-19) yang menyerang seluruh lapisan masyarakat di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan bahwa Covid-19 merupakan sebuah pandemik global dan meminta ke semua negara untuk melakukan upaya semaksimal mungkin guna membatasi penyebaran maupun jumlah kasus Covid-19. Covid-19 sangat berbeda dengan jenis penyakit epidemik lainnya seperti kolera, influenza, flu burung dan lain sebagainya. Wabah covid-19 ini sangat banyak memberikan dampak dan menyiksa manusia karena jenis penularannya melalui percikan dahak atau kontak langsung dengan penderita, hingga menyebabkan kematian.

Adanya Covid-19 ini membawah pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat, dimana segala kegiatan diluar rumah dibatasi, juga harus mengikuti himbauan dari pemerintah mengenai cara penanganan, dan kondisi ini pun hampir menghentikan seluruh aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, perdagangan dan aktivitas atau kegiatan ekonomi lainnya, bahkan negara harus mengucurkan dana untuk dapat menunjang kebutuhan hidup bagi rakyatnya yang dirumahkan atau untuk mengkonstruksi fasilitas medis baru. Menurut hasil analisis dari *International Monetary Fund* (IMF), ekonomi global akan mengalami penyusutan setidaknya mencapai 3% tahun ini dikarenakan hadirnya pandemi. Di Indonesia sendiri, Sri Mulyani selaku sebagai menteri keuangan memprediksi bahwa ekonomi di Indonesia sudah mencapai minus 0,4% tahun ini. Sejak hadirnya kasus pertama covid-19 di Indonesia yang diumumkan pada awal Maret 2020 lalu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan mendapa bahwa sudah ada sekitar 1.5 juta masyarakat yang sudah kehilangan pekerjaan di Indonesia. Perkembangan dari penularan virus ini sendiri cukup signifikan karena penyebarannya yang sudah mendunia serta negara diseluruh dunia telah merasakan dampaknya. Untuk mengantisipasi juga mengurangi kasus penderita wabah covid-19 di Indonesia telah dilakukan diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Dimana Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aktifitas ketika diluar rumah, membatasi untuk melakukan pekerjaan diluar rumah dan proses ibadah yang dibatasi dan dilakukan dari rumah.

Untuk bisa mencegah penyebaran dan penularan covid-19 menyebar dengan luas di kalangan warga, maka pemerintah melakukan serangkaian peraturan dalam mengatasinya. Sehingga tepat pada 31 Maret tahun 2020 presiden Indonesia Bapak Jokowi melakukan konferensi pers dengan maksud agar bisa mengumumkan pada seluruh masyarakat terkait kebijakan yang telah diambil, yaitu terkait peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ditetapkannya juga keputusan dari Kemenkes Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 mengenai protokol kesehatan.

Pengertian untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar Sendiri adalah pembatasan-pembatasan berbagai kegiatan tertentu yang dilakukan masyarakat dalam suatu area yang telah diduga terjangkit *corona virus disease* atau covid-19 yang sedemikian rupa agar bisa menghalau kemungkinan terjadinya penularan covid-19. Penerapan dari PSBB diyakini bisa menjadi suatu cara yab baik untuk bisa menekan laju penyebaran covid-19. Namun dilihat dari perkembangan penyebaran dan penularannya hingga pada tanggal 17 Juni tahun 2020 yang tercatat menderita kasus positif corona di Indonesia sudah meningkat sebanyak 40.400 orang. Pasien yang sembuh dari kasus positif covid-19 sebanyak 15.703 orang serta yang diketahui meninggal dunia tercatat sebanyak 2.231 orang. Dapat dilihat bahwa jumlah oaring yang terinfeksi terus terjadi peningkatan.

Dampak dari covid-19 sendiri begitu besar, dan cirus ini bersifat global. Tentunya hal ini tak hanya dapat mempengaruhi tingkat dari kesehatan warga secara luas, tapi juga

sangat mempengaruhi kegiatan atau aktivitas ekonomi, sosial, psikologi, budaya, politik, pemerintahan, pendidikan, bidang olahraga, agama dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan kebijakan yang cermat dari pihak pemerintah agar bisa mencegah serta mengatasi virus ini. Tentunya kebijakan yang dibutuhkan tak hanya menjadi kebijakannya untuk bisa mencegah dan juga menyembuhkan penderita yang terjangkit virus ini, tetapi juga suatu kebijakan agar bisa menghalau dampak-dampak sosial, juga dampak ekonomi yang disebabkan wabah ini.

Pada intinya kebijakan sebagai keputusan ataupun pilihan dalam bertindak secara langsung mengatur pengelolaan serta pendistribusian sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik bisa dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil dari evaluasi suatu pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya respon yang baik dari masyarakat tentunya kebijakan akan mampu berjalan dengan baik, respon masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan covid-19 ini sangat beragam dari yang sangat mematuhi dan ada juga yang masih masa bodoh terhadap bahaya virus ini.

Respon masyarakat dalam menanggapi covid-19 ini memang sangat bervariasi, ada yang sungguh-sungguh patuh dalam mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, namun ada pula yang mengerti tetapi karena alasan ekonomi, maka terpaksa mereka bekerja diluar rumah demi bisa bertahan hidup, dan ada pula yang meremehkan virus ini dengan beranggapan hanya sebatas virus biasa jadi tidak perlu ditakuti. Maka tak heran jika angka kasus positif covid-19 ini terus meningkat. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian besar bagi kita semua dengan jumlah kasus positif terbilang banyak ialah di kelurahan Tamamaung Kota Makassar.

Puskesmas Tamamaung tercatat bahwa sejak bulan april 2020 selalu ada masyarakat yang terkena kasus positif covid-19, hingga terjadi lonjak yang cukup banyak di bulan januari 2021. Juga Dari pengamatan yang peneliti lihat dilapangan bahwa masih ada beberapa warga yang jika keluar rumah tidak mematuhi protokol kesehatan, salah satu yang sangat sering terjadi ialah tidak menggunakan masker. Mereka acuh tak acuh saat melakukan kegiatan diluar rumah tanpa menggunakan masker. Padahal penggunaan masker ini menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah penularan covid-19, juga berita dari berbagai media sosial, yang mengatakan bahwa masih ada warga yang tetap juga berkumpul di tempat umum, seperti di kafe dan warkop. Hal ini menimbulkan berbagai asumsi dari peneliti ialah bertambahnya angka positif covid-19 ini karena lemahnya koordinasi antar- *stakeholder*, dan ketidakpedulian warga atas himbauan dari pemerintah. Sebagai langkah pengembangan argument-argument agar bisa menyampaikan atau menjelaskan berbagai asumsi diatas, sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait “Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Covid-19 Di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar”.

Respon masyarakat terhadap covid-19 terbilang bervariasi meskipun begito hal ini bisa mengarah pada perilaku seorang dalam bertindak secara positif dalam mencegah penularan, agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya penanganan virus, juga penting untuk mengetahui terkait berbagai media penyaluran yang tepat. Sumber informasi yang sangat dipercayai masyarakat terkait covid-19 ini ialah melalui tv, bisa melalui koran, radio, media sosial, dan juga dari berbagai situs internet. Masyarakat juga harus diberikan komunikasi dan harus selalu diingatkan mengenai kampanye sehat menggunakan masker, berjaga jarak aman serta mencuci tangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentahui upaya pemerintah dalam penanganan covid-19 di kelurahan Tamamaung kecamatan Panakukkang kota Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu salah satu cara yang digunakan dalam melakukan penelitian pada suatu keadaan atau kondisi objek yang alamiah yang mana peneliti sebagai instrument utama, dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi/gabungan. Jenis dari penelitian ini bersifat deskriptif yang mana dimaksudkan agar memberikn suatu gambaran dengan tepat dan jelas terkait permasalahan yang di lakukan. Lokasi penelitian di Puskesmas Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Dalam penelitian kualitatif analisis data menggunakan cara induktif yakni dari umum ke khusus. Data dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan juga dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kebijakan

Mengenai Pelaksanaan kebijakan pemerintah Kelurahan Tamamaung dalam menanggulangi covid-19 memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan diantaranya harus mengikuti prosedur dari Walikota. Juga melakukan prokes-prokes dikelurahan seperti penyediaan tempat cuci tangan diberbagai lokasi, pembagian masker dan juga handsanitizer kepada masyarakat terkhususnya ditempat umum, menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak. Pemerintah kelurahan akan menjalankan Kebijakan Makassar Rcover yang ditetapkan oleh Walikota. Makassar yang sebagai kebijakan baru yang sedang dijalankan saat ini ialah kebijakan Makassar Recover yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar No 5 2021 dengan di tandatangani tanggal 15 maret 2021 dimana sebagai langka terbaru dalam pemulihan ekonomi daerah selain itu kebijakan tersebut dilakukan dengan melakukan deteksi serta disetiap masyarakat, mencari masyarakat yang terpapar covid-19 serta meberikan edukasi kasih terkait covid-19. Dan Puskesmas sebagai garda terdepan dalam kondisi kesehatan masyarakat berpedoman pada pencegahan dan pengendalian covid-19 revisi 4 tahun 2020 dimana harus didukung dengan peran Dinas Kesehatan agar dapat berjalan optimal serta dalam menjalankan tugas pihak puskesmas tentunya harus bekerjasama dengan kelurahan karena puskesmas akan menampung segala bentuk informasi dari kelurahan agar bisa menindak lanjuti terkhususnya dalam proses pelayanan.

Terkait komunikasi yang dilakukan dalam penanggulangan covid-19 pemerintah kelurahan melakukan sosialisasi, juga turun langsung ketempat-tempat umum seperti pasar untuk memberikan himbauan langsung kepada masyarkat terkait cara pencegahan covid yang baik, juga pemasangan baliho ditempat umum, lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap minggu pihak kelurahan selalu melakukan koordinasi dengan wajib menerima laporan dari RT/RW terkait perkembangan yang terjadi di masyarakat, hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Badan Tata Usaha Puskesmas Tamamaung bahwa ada beberapa cara yang dilakukan diantra melakukan kerjasama seperti gugus tugas tingkat RW atau relawan dari kelurahan, ormas, tokoh agama. Membuat berbagai media promosi kesehatan yang berdasarkan pada protokol kesehatan seperti pencegahan dilevel individu, keluarga, masyarakat dan para kelompok rentan. Media-media tersebut disebarluaskan ada yang melalui media sosial dan secara langsung seperti poster, stiker, spanduk dan baliho. Langka-langka tersebut dilakukan pemerintah kelurahan sebagai upaya penyampain kepada masyarakat terkait pencegahan terhadap covid-19.

Pelaksanaan kebijakan harus disukung dengan penyediaan sumberdaya baik itu manusia, meteri, dan metoda. Dalam pelaksanaan kebijakn public harus dilaksanakan

dengan cermat, jelas, serta konsisten namun jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang dibuthkan maka pelaksanaan kebijakn akan lebih cenderung tak bisa dilakukan dengan efektif.

Pada kesempatan penelitian di Kantor Kelurahan Tamamaung Ibu Armi Maroa selaku Kepala Kelurahan Tamamaung menjelaskan dalam upaya penanganan covid-19 bahwa pihak kelurahan menyiapkan berbagai fasilitas seperti tempat cuci tangan dan handsanitizer bukan hanya di tempat umum tetapi juga di kantor kelurahan. pembangunan poskoh-poskoh juga dilakukan dengan bekerjasama bersama Tim Satgas dan TNI/Polri sebagai pihak keamanan yang akan melakukan penjagaan di pendirian poskoh-poskoh tersebut. Tujuan dari pembangunan pembangunan poskoh sendiri ialah untuk mengkoordinasi, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, dan mengeksekusi penanganan covid-19 di kelurahan. Jika dilihat dari sumberdaya manusia pihak kelurahan bekerjasama dengan tim satgas juga TNI/Polri dalam melakukan pengawasan. Fungsi dari satgas sendiri ialah: membentuk posko dan call center serta menginformasikan kepada masyarakat, memberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian serta penanganan penyebaran covid-19, melarang pelaksanaan kegiatan masyarakat yang bersifat mengumpulkan massa dan jumlah besar termasuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sejenisnya. Pada masa pandemi saat ini kelurahan menjadi salah satu yang paling rentan terkena dampak yaitu berdampak pada gangguan perekonomian mayarakat. Sehingga urgensitas penguatan masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan pada kondisi saat ini.

Dari pihak Puskesmas juga mengatakan bahwa ketersediaan sumberdaya manusia tetap pada jumlah yang ada dan metoda dalam penanggulangan covid-19 tetap pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Bisa dilihat bahwa pihak kelurahan tetap menyediakan fasilitas dalam menanggulangi covid-19 kepada masyarakat, kerjasama dengan pihak keamanan ikut membantu dalam proses pencegahan ini dan sumberdaya manusia dari pihak puskesmas tetap pada jumlah yang ada dan terjadi penambahan jika ada yang terdampak.

Sikap yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan terkait penanganan covid-19 seperti yang diungkapkan dari pihak puskesmas Tamamaung mengatakan bahwa mereka tetap mengedepankan komunikasi yang baik kepada masyarakat serta setiap pelayanan yang dilakukan didahulukan dengan pemberian edukasi. Masyarakat juga memiliki hak untuk menerima dan menolak tindakan yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan. Dapat dilihat bahwa pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan sikap kekeluargaan dan kerjasama yang baik perlu ditanamkan didalam suatu tatanan pemerintahan sehingga menghasilkan komunikasi dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Respon Masyarakat

Informasi yang jelas dalam suatu proses pensosialisasian turut menentukan tingkatan pengetahuan serta pemahamn yang luas dari berbagai pihak yang memang telah ikut serta kedalam proses dari jalannya kebijakn yang dilakukan, sehingga maksud ataupun substansi dari kebijakan itu memang benar-benar mempunyai kejelasan, terperinci serta bisa dipahami secara gampang.

Proses pengawasan terhadap jalannya suatu kebijakan dilihat masih kurang. Menurut Prayudi pengawasan ialah suatu proses untuk menetapkan yang sedang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang ingin dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota

Makassar yaitu, pemerintah kelurahan tetap menjalankan kebijakan berdasarkan prosedur yang ada. Namun masih kurangnya sosialisasi yang belum berjalan dengan maksimal diperlihatkan dengan beberapa masyarakat yang masih belum memahami beberapa kebijakan yang ada hal ini dikarenakan salah satu proses pemberian sosialisasi yang dilakukan melalui pihak RT/RW tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat bisa menerima informasi yang ada. Respon masyarakat terhadap upaya penanggulangan covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar yaitu, terjadi perubahan sikap masyarakat dalam bentuk respon kognitif, respon afektif, dan respon konatif (tindakan) sejak hadirnya wabah covid-19 di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukkang Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Anggara Sahya. 2014. Pengantar Kebijakan Publik. Cv Pustaka Setia: Bandung
- Fahmal A. Muin. 2008. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. Kreasi Total Media: Jakarta Selatan
- Hamdi Muchlis. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta: Jakarta
- Kurniaan Luthfi J dan Mustafa Lutfi. 2017. Hukum dan Kebijakan Publik. Serara Perss: Malang
- Mukarom Zaenal dan Wijaya Laksana. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Cv Pustaka Setia: Bandung.
- Nazir Moh. 2009. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Nurdin Ismail. 2019. Kualitas Pelayanan Publik. Media Sahabat Cendekia: Surabaya
- Rahmat Jalaludin. 2007. Psikologi Komunikasi. Remaja Rosda Persada: Bandung
- Syafiie Inu Kencana. 2007. Ilmu Pemerintah. Mandar Maju: Bandung
- Soekanto Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta, cv: Bandung.
- Winamo Budi. 2008. Teori & Proses Kebijakan Publik. MedPress: Yogyakarta